

### BAB III

#### PENGINTEGRASIAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn)

##### A. PENGINTEGRASIAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SK/KD

##### MODEL INTEGRASI PENGEMBANGAN ASPEK DAN INDIKATOR PENDIDIKAN ANTIKORUPSI SEKOLAH DASAR / MADRASAH IBTIDAIYAH (SD/MI)

STANDAR KOMPETENSI	KOMPETENSI DASAR	KLS/ SMT	PENDIDIKAN ANTIKORUPSI		MODEL INTEGRASI
			DIMENSI DAN INDIKATOR	NILAI ACUAN	
1. Menghargai nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara	1.1. Mendeskripsikan nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara.	VI/1	<b>1. Politik:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Membuat kebijakan didasarkan pada kepentingan umum/bersama bukan ambisi pribadi yang menguntungkan kelompok tertentu (adil)</li> <li>Tidak melaksanakan kebijakan didasari oleh sikap <i>Clientelistik</i> (janji-janji dengan hadiah supaya mengikuti kemauannya) (berani, adil)</li> </ol> <b>2. Sosiologi:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Selalu menepati janji. (disiplin, tanggung jawab)</li> </ol>	<p>KEBERSAMAAN: Hal bersama, seperti rasa persaudaraan, kekeluargaan, senasib sepenanggungan dan merasa menjadi satu kesatuan (integritas).</p> <p>KONSEKUEN: sesuai dengan apa yang dikatakan/diperbuat, berwatak teguh, tidak menyimpang dari apa yang sudah diputuskan</p> <p>BIJAKSANA: selalu menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuannya), arif, tajam pikiran, pandai dan hati-hati (cermat, teliti, dsb.)</p>	<p>Nilai, biasanya selalu berkaitan dengan hal-hal yang baik, bagus, indah, berguna, dan berharga. Nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila berarti hal-hal yang baik, yang indah, yang berharga ketika merumuskan Pancasila seperti <u>kebersamaan</u>, <u>persatuan dalam perbedaan</u>, <u>rela berkorban</u> demi tercapainya cita-cita bersama, yaitu terumuskannya dasar negara. Oleh karena itu, sebagai generasi muda harus berani dan rela berkorban untuk kepentingan umum/bersama.</p> <p>Nilai juang yang ditampilkan oleh para tokoh perumus Pancasila selalu mengedepankan kepentingan umum/bangsa, seperti konsekuen, bijaksana, dan kerja keras. (<u>dimensi politik</u>) dan selalu menghindari perilaku ambisi pribadi dan tidak mencari keuntungan pribadi. Para perumus Pancasila juga tidak mengingkari janji yang sudah disepakati, tidak membedakan dalam memberi kesempatan berbicara. Ketika itu, semua yang hadir diberi hak</p>

STANDAR KOMPETENSI	KOMPETENSI DASAR	KLS/ SMT	PENDIDIKAN ANTIKORUPSI		MODEL INTEGRASI
			DIMENSI DAN INDIKATOR	NILAI ACUAN	
			b. Tidak adanya deskriminasi dalam memberikan pelayanan. (adil) <b>3. Ekonomi:</b> a. Melakukan persaingan sehat demi keberhasilan (jujur, kerja keras, tanggung jawab) b. Hemat dalam menggunakan sumber daya (sederhana,) <b>4. Hukum:</b> a. Tidak melakukan pemalsuan dokumen, surat, tanda tangan. (jujur) b. Tidak melakukan penipuan terhadap pihak lain (jujur, disiplin) c. Tidak melakukan pengrusakan milik negara/milik umum (tanggung jawab)	IKHLAS: bersih hati, tulus hati. RAJIN: suka bekerja (belajar dsb.), tekun, sungguh2 bekerja, selalu berusaha giat, terus menerus. SPORTIF: bersifat kesatria, jujur, tegak (tetap pendirian, tetap memegang keadilan). TANGGUNG JAWAB: keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb. Misalnya berani dan siap menerima resiko, amanah, tidak mengelak, dan berbuat yang terbaik), hak fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain, melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh. DISIPLIN: tata tertib, ketaatan (kepatuhan) pada peraturan, tepat waktu, tertib, dan konsisten. JUJUR: lurus hati, tidak curang, tulus, dapat dipercaya, berkata dan bertindak benar, mengungkapkan sesuatu	untuk berpendapat. Panitia perumus Pancasila saling <u>bekerjasama</u> , tidak ada persaingan yang tidak sehat, semua panitia bekerja keras, tidak boros waktu, menghemat biaya, dan makan seadanya. ( <u>dimensi ekonomi</u> ) Semua tim perumus Pancasila tidak melakukan perbuatan tercela seperti pemalsuan maupun penipuan dokumen-dokumen usulan dasar negara, baik usulan dari Moh. Yamin, Mr Soepomo, dan Ir. Soekarno. Mereka tetap menjaga dari kerusakan terhadap dokumen-dokumen perumusan Pancasila dengan <u>ikhlas, sportif, jujur, dan tanggung jawab</u> . Tindakan kurang terpuji yang harus dihindari seperti tersebut di atas merupakan bentuk korupsi dilihat dari aspek <u>hukum</u> . Dalam perumusan Pancasila tidak langsung jadi. Namun, ada beberapa tokoh, seperti Soepomo, Soekarno yang mengusulkan isi Pancasila yang berbeda isinya. Usulan-usulan tersebut tidak langsung diterima oleh BPUPKI. Setiap usulan ditampung dan dimusyawarahkan bersama. Oleh karena itu, dibentuklah sebuah tim khusus. Tim tersebut kemudian berkembang menjadi sebuah panitia kecil yang terdiri atas sembilan orang. Mereka adalah Soekarno, Moh. Hatta, Moh. Yamin, Ahmad Soebardjo, A.A. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, K.H. Wachid Hasyim, H. Agus Salim, dan Abikoesno Tjokrosoejoso. Tim inilah yang kemudian disebut sebagai Panitia Sembilan. Panitia

STANDAR KOMPETENSI	KOMPETENSI DASAR	KLS/ SMT	PENDIDIKAN ANTIKORUPSI		MODEL INTEGRASI
			DIMENSI DAN INDIKATOR	NILAI ACUAN	
				sesuai dengan kenyataan (tidak berbohong), dan punya niat yang lurus terhadap setiap tindakan.  KERJA KERAS: kegiatan melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, pantang menyerah/ulet dan semangat dalam berusaha.	Sembilan bertugas membahas lebih lanjut usulan-usulan tentang dasar negara. Peristiwa ini membuktikan bahwa Tim Sembilan tidak diskriminatif dalam pelayanan semua tokoh diberi hak untuk mengemukakan pendapat. ( <u>dimensi sosiologi</u> )
	1.2. Meneladani nilai-nilai juang para tokoh yang berperan dalam proses perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara dalam kehidupan sehari-hari		<b>1. Politik:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Membuat kebijakan didasarkan pada kepentingan umum/bersama bukan ambisi pribadi yang menguntungkan kelompok tertentu</li> <li>Tidak melaksanakan kebijakan didasari oleh sikap <i>Clientelistik</i> (janji-janji dengan hadiah supaya mengikuti kemauannya)</li> </ol> <b>2. Sosiologi:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Selalu menepati janji</li> <li>Tidak adanya deskriminasi dalam memberikan pelayanan.</li> </ol>	KEBERSAMAAN: Hal bersama, seperti rasa persaudaraan, kekekeluargaan, senasib sepenanggungan dan merasa menjadi satu kesatuan (integritas).  HEMAT: berhati-hati dalam membelanjakan uang, tidak boros, cermat.  BIJAKSANA: selalu menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuannya), arif, tajam pikiran, pandai dan hati-hati (cermat, teliti, dsb.)  RAJIN: suka bekerja (belajar dsb.), tekun, sungguh2 bekerja, selalu berusaha giat, terus menerus.  SPORTIF: bersifat kesatria,	Meneladani nilai-nilai juang para tokoh yang berperan dalam proses perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara sangat penting dilakukan. Nilai-nilai tersebut adalah <u>kebersamaan</u> , persatuan dalam perbedaan, musyawarah, toleransi, saling menghargai pendapat, rela mengorbankan tenaga, waktu dan pemikiran ( <u>rajin</u> ) demi terumuskannya Pancasila sebagai Dasar Negara. ( <u>dimensi politik</u> ) Kebersamaan selalu ditunjukkan oleh para tokoh perumus Pancasila, ia selalu menghindarkan diri dari perilaku seperti ambisi pribadi, mencari keuntungan pribadi, dan tidak ada janji-janji atau tuntutan dari para tokoh di kemudian hari, karena tindakan tersebut merupakan perbuatan tercela ( <u>tidak sportif</u> ) yang dapat dikategorikan sebagai bentuk korupsi. ( <u>dimensi sosiologi</u> ). Para tokoh ketika bersidang selalu hadir tepat waktu, berarti mereka tidak korupsi waktu ( <u>disiplin</u> ). Setiap anggota tim perumus juga diberi kesempatan untuk berbicara dan berpendapat, tidak ada deskriminasi dalam memberikan kesempatan. ( <u>dimensi sosiologi</u> ) Para tokoh juga bersatu padu, walaupun mereka

STANDAR KOMPETENSI	KOMPETENSI DASAR	KLS/ SMT	PENDIDIKAN ANTIKORUPSI		MODEL INTEGRASI
			DIMENSI DAN INDIKATOR	NILAI ACUAN	
			<p><b>3. Ekonomi:</b></p> <p>a. Melakukan persaingan sehat demi keberhasilan</p> <p>b. Hemat dalam menggunakan sumber daya</p> <p><b>4. Hukum:</b></p> <p>a. Tidak melakukan pemalsuan dokumen, surat, tanda tangan</p> <p>b. Tidak melakukan penipuan terhadap pihak lain</p> <p>c. Tidak melakukan pengrusakan milik negara/milik umum</p>	<p>jujur, tegak (tetap pendirian, tetap memegang keadilan).</p> <p>TANGGUNG JAWAB: keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb. Misalnya berani dan siap menerima resiko, amanah, tidak mengelak, dan berbuat yang terbaik), hak fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain, melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh.</p> <p>DISIPLIN: tata tertib, ketaatan (kepatuhan) pada peraturan, tepat waktu, tertib, dan konsisten.</p> <p>JUJUR: lurus hati, tidak curang, tulus, dapat dipercaya, berkata dan bertindak benar, mengungkapkan sesuatu sesuai dengan kenyataan (tidak berbohong), dan punya niat yang lurus terhadap setiap tindakan.</p> <p>KERJA KERAS: kegiatan melakukan sesuatu dengan</p>	<p>berasal dari beragam suku, agama, daerah, mereka tidak menunjukkan persaingan yang tidak sehat dan <u>menghindari dari sikap boros</u> dalam memanfaatkan fasilitas seperti kertas, waktu, dan dana. (<u>dimensi ekonomi</u>)</p> <p>Di samping itu, perilaku yang perlu dicontoh dari para tokoh perumus Pancasila sebagai dasar negara adalah membuat peraturan, mereka selalu bermusyawarah dalam memecahkan perbedaan pendapat, menjaga keaslian dokumen-dokumen hasil perumusan, ia secara ikhlas mengorbankan tenaga, waktu dan pemikiran, karena itu ia <u>menghindarkan diri dari penipuan</u> terhadap sesama tim perumus dan selalu menjaga dokumen hasil perumusan dari kerusakan, karena itu merupakan dokumen penting. (<u>dimensi hukum</u>)</p> <p>Keteladanan lain para tokoh perumus Pancasila yang dapat dijadikan contoh adalah toleransi dari anggota perumus Pancasila. Adanya perbedaan dalam berpendapat tidak menjadi penghambat, tetapi karena adanya toleransi akhirnya berhasil di rumuskan Pancasila Dasar Negara. (<u>dimensi politik</u>)</p> <p>Ketika merumuskan Pancasila sebagai dasar negara, sikap yang perlu dicontoh dari mereka adalah sikap <u>kerja keras, pantang menyerah, dan berjiwa besar</u>. Meskipun terjadi perbedaan pendapat yang sangat tajam pada akhirnya perumusan Pancasila sebagai dasar Negara dapat terwujud. Hal ini dapat terjadi karena dalam membuat kebijakan-kebijakan mereka selalu mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi maupun golongan.</p>

STANDAR KOMPETENSI	KOMPETENSI DASAR	KLS/ SMT	PENDIDIKAN ANTIKORUPSI		MODEL INTEGRASI
			DIMENSI DAN INDIKATOR	NILAI ACUAN	
				sungguh-sungguh, pantang menyerah/ulet dan semangat dalam berusaha.	
2. Memahami sistem pemerintahan Republik Indonesia	2.1. Menjelaskan proses Pemilihan umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).		<b>1. Politik:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Membuat kebijakan didasarkan pada kepentingan umum/bersama bukan ambisi pribadi yang menguntungkan kelompok tertentu</li> <li>Tidak melaksanakan kebijakan yang didasari oleh sikap <i>Clientelistik</i> (janji-janji dengan hadiah supaya mengikuti kemauannya)</li> <li>Tidak terbang pilih.</li> </ol> <b>2. Sosiologi:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tidak melakukan deskriminasi</li> <li>Tidak melakukan nepotisme</li> <li>Tidak melakukan kolusi.</li> </ol> <b>3. Ekonomi:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan persaingan yang sehat demi keberhasilan</li> <li>Tida menerima suap</li> </ol>	HEMAT: berhati-hati dalam membelanjakan uang, tidak boros, cermat.  SPORTIF: bersifat kesatria, jujur, tegak (tetap pendirian, tetap memegang keadilan).  TANGGUNG JAWAB: keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb. Misalnya berani dan siap menerima resiko, amanah, tidak mengelak, dan berbuat yang terbaik), hak fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain, melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh..  JUJUR: lurus hati, tidak curang, tulus, dapat dipercaya, berkata dan bertindak benar, mengungkapkan sesuatu sesuai dengan kenyataan (tidak berbohong), dan punya niat yang lurus terhadap setiap	<p>Salah satu ciri negara demokrasi adalah adanya pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Dalam proses pemilu dan pilkada harus dihindari ambisi pribadi, dan persekongkolan, karena akan mendorong orang untuk menghalalkan segala cara demi kemenangan dalam Pemilu maupun Pilkada.(kejujuran) Perilaku seperti ini berarti tidak melakukan korupsi dilihat dari <u>dimensi politik</u>.</p> <p>Di samping itu, dalam proses pemilu maupun Pilkada pembuatan keputusan hasil Pemilu dan Pilkada harus didasarkan untuk kepentingan umum bukan untuk keuntungan kelompok tertentu, karena hal itu bertentangan dengan keadilan dan merupakan bentuk korupsi di bidang politik. Demikian juga dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada harus dilakukan secara <u>adil</u>, tidak boleh terbang pilih.misalnya dalam pendaftaran calon pemilih dan dipilih diberikan kesempatan yang sama sesuai dengan persyaratan, sehingga tidak ada deskriminasi (<u>adil</u>) dalam memberi kesempatan untuk ikut serta dalam pemilihan umum dan Pilkada. (<u>dimensi politik</u>)</p> <p>Ditinjau dari segi sosiologis dan ekonomi, proses penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada harus terhindar dari tindakan <u>nepotisme</u> atau semata-mata hanya mencari keuntungan pribadi dan menghindari persekongkolan (<u>kolusi</u>) demi keuntungan pribadi. Di samping itu, setiap calon yang dipilih harus siap kalah</p>

STANDAR KOMPETENSI	KOMPETENSI DASAR	KLS/ SMT	PENDIDIKAN ANTIKORUPSI		MODEL INTEGRASI
			DIMENSI DAN INDIKATOR	NILAI ACUAN	
			<p>c. Tidak boros dalam memanfaatkan sumber daya.</p> <p><b>4. Hukum:</b></p> <p>a. Tidak melakukan penggelapan.</p> <p>b. Tidak melakukan pemalsuan</p> <p>c. Tidak melakukan pencurian</p> <p>d. Tidak melakukan penipuan</p> <p>e. Tidak melakukan persekongkolan</p>	<p>tindakan.</p> <p>MANDIRI: dalam keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung dengan orang lain, percaya pada kemampuan diri sendiri, mampu mengatur dirinya sendiri, dan mengambil inisiatif.</p> <p>BERANI: mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dsb. (Tidak takut, gentar, kecut) dan pantang mundur.</p>	<p>atau menang (<u>sportif</u>) tidak dibenarkan melakukan persaingan yang tidak sehat, melakukan suap atau politik uang, dan menghambur-hamburkan dana negara. (<u>tidak sehat</u>)</p> <p>Tindakan lainnya yang harus dihindari dalam proses pemilu atau pilkada yang berkaitan dengan ketaatan pada peraturan perundangan/hukum adalah penggelapan suara (<u>tidak jujur</u>) pemalsuan dokumen, pencurian suara, penipuan calon pemilih ataupun yang dipilih, dan tidak melakukan persekongkolan antar panitia pemilihan, karena perbuatan tidak terpuji di atas termasuk perbuatan korupsi. (<u>dimensi hukum</u>)</p> <p>Dalam pemilu/pilkada seorang petugas juga harus bersikap adil artinya tidak pilih kasih, netral, obyektif, tidak diskriminatif, dan tidak memihak kepada siapa pun. Semua masyarakat harus diperlakukan dengan sama sesuai hak dan kewajibannya. Sebab kalau tidak demikian atau bersikap sebaliknya maka dapat dikatakan melakukan korupsi ditinjau dari <u>politik</u> dan <u>hukum</u>.</p> <p>Sebagai anggota masyarakat juga harus <u>berani</u> melaporkan kepada pihak yang berwajib jika merasa hak-haknya dikebiri. Karena hal itu merupakan pelanggaran di bidang hukum</p>
	2.2. Mendeskripsikan tugas dan fungsi pemerintahan pusat dan daerah		<p><b>1. Politik:</b></p> <p>a. Membuat kebijakan didasarkan pada kepentingan umum/bersama bukan ambisi pribadi yang menguntungkan</p>	<p>KEBERSAMAAN: Hal bersama, seperti rasa persaudaraan, kekekeluargaan, senasib sepenanggungan dan merasa menjadi satu kesatuan (integritas).</p> <p>HEMAT: berhati-hati dalam</p>	<p>Tugas merupakan suatu perintah yang harus dijalankan, sehingga menjadi tanggung jawab bagi penerima tugas untuk menjalankan tugas tersebut. Dalam tatanan pemerintahan tugas yang harus dijalankan itulah menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam keadaan tertentu pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk</p>

STANDAR KOMPETENSI	KOMPETENSI DASAR	KLS/ SMT	PENDIDIKAN ANTIKORUPSI		MODEL INTEGRASI
			DIMENSI DAN INDIKATOR	NILAI ACUAN	
			<p>kelompok tertentu</p> <p>b. Tidak melaksanakan kebijakan didasari oleh sikap <i>Clientelistik</i> (janji-janji dengan hadiah supaya mengikuti kemauannya)</p> <p>c. Tebang pilih.</p> <p><b>2. Sosiologi</b></p> <p>a. Tidak melakukan deskriminasi</p> <p>b. Tidak melakukan nepotisme</p> <p>c. Tidak melakukan kolusi.</p> <p><b>3. Ekonomi:</b></p> <p>a. Melakukan persaingan yang sehat demi keberhasilan</p> <p>b. Tidak menerima suap</p> <p>c. Tidak boros dalam memanfaatkan sumber daya</p> <p><b>4. Hukum:</b></p> <p>a. Tidak melakukan penggelapan.</p> <p>b. Tidak melakukan pemalsuan</p> <p>c. Tidak melakukan pencurian</p> <p>d. Tidak melakukan</p>	<p>membelanjakan uang, tidak boros, cermat.</p> <p>SPORTIF: bersifat kesatria, jujur, tegak (tetap pendirian, tetap memegang keadilan).</p> <p>TANGGUNG JAWAB: keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb. Misalnya berani dan siap menerima resiko, amanah, tidak mengelak, dan berbuat yang terbaik), hak fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain, melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh.</p> <p>JUJUR: lurus hati, tidak curang, tulus, dapat dipercaya, berkata dan bertindak benar, mengungkapkan sesuatu sesuai dengan kenyataan (tidak berbohong), dan punya niat yang lurus terhadap setiap tindakan.</p> <p>ADIL : sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak /tidak pilih kasih, berpihak/berpegang</p>	<p>mengatur pemerintah daerah, sehingga daerah harus melaksanakannya. <i>Namun, dalam melaksanakan kewenangannya pemerintah pusat tidak boleh sewenang-wenang (adil), mereka harus memperhatikan kepentingan umum/bersama. (dimensi politik)</i></p> <p>Tugas pemerintah baik pusat maupun daerah antara lain (1) melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan, kerukunan nasional, keutuhan NKRI, (2) mengembangkan demokrasi, (3) mewujudkan keadilan dan pemerataan kesejahteraan, (4) meningkatkan dan menyediakan pendidikan, kesehatan, fasilitas umum, jaminan sosial warganya, (5) melestarikan lingkungan dan nilai-nilai sosial budaya bangsa. <i>Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugasnya pemerintah harus benar-benar memihak kepada rakyat, tidak boleh melakukan deskriminasi, nepotisme, maupun kolusi. (dimensi sosiologi, politik)</i></p> <p>Untuk mewujudkan tugas dan wewenang tersebut, dalam membuat kebijakan tidak dibenarkan berdasarkan pada ambisi pribadi yang hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi harus didasari kepada rasa <u>keadilan</u>.</p> <p>Demikian juga, dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan perlu dilakukan secara merata, adil, tidak tebang pilih. Pelayanan fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, hukum harus dihindari dari tindakan deskriminasi, nepotisme, kolusi, persekongkolan. Karena hal itu melanggar hukum. <i>(dimensi politik, hukum)</i></p> <p>Untuk mengembangkan demokrasi ekonomi, harus dihindari persaingan yang tidak sehat, seperti memberi</p>

STANDAR KOMPETENSI	KOMPETENSI DASAR	KLS/ SMT	PENDIDIKAN ANTIKORUPSI		MODEL INTEGRASI
			DIMENSI DAN INDIKATOR	NILAI ACUAN	
			penipuan e. Tidak melakukan persekongkolan	kepada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang, seimbang, netral, objektif dan proporsional.	<p>kesempatan seluas-luasnya kepada pengusaha besar menguasai dari hulu sampai hilir sehingga mematikan pengusaha kecil. Karena hal itu bertentangan dengan asas ekonomi kerakyatan/kekekeluargaan. Di samping itu, tindakan penyuapan kepada pejabat, petugas, aparatur negara, serta penggunaan sumber daya negara secara berlebihan yang mengarah kepada tindakan <u>pemborosan</u>, harus dihindari karena perbuatan itu merupakan perbuatan yang <i>tidak bertanggung jawab</i>. <u>(dimensi ekonomi)</u></p> <p>Pejabat di pemerintah pusat maupun daerah, ketika memiliki wewenang dan kekuasaan, terkadang timbul niat jahat untuk menyalahgunakannya, karena itu tindakan jahat seperti penggelapan uang, barang, pemalsuan dokumen, surat-surat, tanda tangan, pencurian, penipuan atau mark up pembiayaan bangunan, serta menerima gratifikasi harus dihindari karena itu semua merupakan tindakan tidak sportif. Hal ini dapat dikategorikan bentuk tindakan korupsi dilihat dari <u>dimensi politik</u>.</p>



**INTEGRASI PENGEMBANGAN ASPEK DAN INDIKATOR KORUPSI  
MELALUI MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn)  
SD/MI KELAS VI SEMESTER 2**

STANDAR KOMPETENSI	KOMPETENSI DASAR	KLS/ SMT	PENDIDIKAN ANTI KORUPSI		MODEL INTEGRASI
			ASPEK DAN INDIKATOR	NILAI ACUAN	
3. Memahami peran Indonesia dalam lingkungan negara-negara di Asia Tenggara	3.2 Memberikan contoh peran Indonesia dalam lingkungan negara-negara di Asia Tenggara	VI/2	<p><b>1. Politik:</b></p> <p>a. Membuat kebijakan didasarkan pada kepentingan umum/bersama bukan ambisi pribadi yang menguntungkan kelompok tertentu (adil)</p> <p>b. Tidak melaksanakan kebijakan didasari oleh sikap <i>Clientelistik</i> (janji-janji dengan hadiah supaya mengikuti kemauannya) (berani, adil)</p> <p><b>2. Sosiologi:</b></p> <p>a. Selalu menepati janji. (disiplin, tanggung jawab)</p> <p>b. Tidak adanya deskriminasi dalam memberikan pelayanan. (adil)</p> <p><b>3. Ekonomi:</b></p> <p>a. Melakukan persaingan sehat demi keberhasilan (jujur, kerja keras, tanggung jawab)</p> <p>b. Hemat dalam</p>	<p>KESETARAAN: kesejajaran, sama tingkatan/kedudukan, sebanding, sepadan, seimbang.</p> <p>KEBERSAMAAN: Hal bersama, seperti rasa persaudaraan, kekeluargaan, senasib sepenanggungan dan merasa menjadi satu kesatuan (integritas).</p> <p>HEMAT: berhati-hati dalam membelanjakan uang, tidak boros, cermat.</p> <p>SPORTIF: bersifat kesatria, jujur, tegak (tetap pendirian, tetap memegang keadilan).</p> <p>DISIPLIN: tata tertib, ketaatan (kepatuhan) pada peraturan, tepat waktu, tertib, dan konsisten.</p> <p>JUJUR: lurus hati, tidak curang, tulus, dapat dipercaya, berkata dan bertindak benar, mengungkapkan sesuatu sesuai dengan kenyataan (tidak berbohong), dan punya niat yang lurus terhadap setiap tindakan.</p> <p>ADIL : sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak /tidak pilih</p>	<p>Secara geografis Indonesia terletak di kawasan Asia Tenggara. Sejak dahulu Indonesia telah menjalin hubungan baik dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Sebagai contoh Indonesia telah menjadi pemrakarsa berdirinya organisasi ASEAN (Association of South Asian Nation) yang diterjemahkan menjadi Perbara (Persatuan Bangsa-bangsa Asia Tenggara). Organisasi tersebut berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967. Peran Indonesia dalam memrakarsai berdirinya ASEAN tersebut membuktikan bahwa Indonesia mampu pemimpin dan mampu bekerja sama dengan dengan negara-negara tetangga. <u>(dimensi politik)</u></p> <p><i>Meneladani nilai-nilai juang para tokoh khususnya dari Indonesia yang berperan dalam pembentukan ASEAN sangat penting dilakukan. Nilai-nilai tersebut adalah kebersamaan, persatuan dalam perbedaan, musyawarah, toleransi, saling menghargai pendapat, rela mengorbankan tenaga, waktu dan pemikiran demi terwujudnya suatu organisasi yang dapat menjadi wahana untuk meningkatkan kerja sama negara-negara di kawasan Asia Tenggara.. (dimensi politik)</i></p> <p>Kebersamaan selalu ditunjukkan oleh para tokoh yang hadir. ia selalu menghindarkan diri</p>

STANDAR KOMPETENSI	KOMPETENSI DASAR	KLS/ SMT	PENDIDIKAN ANTI KORUPSI		MODEL INTEGRASI
			ASPEK DAN INDIKATOR	NILAI ACUAN	
			<p>menggunakan sumber daya (sederhana,)</p> <p><b>4. Hukum:</b></p> <p>a. Tidak melakukan pemalsuan dokumen, surat, tanda tangan. (jujur)</p> <p>b. Tidak melakukan penipuan terhadap pihak lain (jujur, disiplin)</p> <p>c. Tidak melakukan pengrusakan milik negara/milik umum (tanggung jawab)</p>	<p>kasih, berpihak/berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang, seimbang, netral, objektif dan proporsional.</p> <p>BERANI: mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dsb. (Tidak takut, gentar, kecut) dan pantang mundur.</p>	<p>dari perilaku seperti ambisi untuk kepentingan pribadi maupun negaranya sendiri mencari keuntungan pribadi, dan tidak ada janji-janji atau tuntutan dari para tokoh di kemudian hari, (<u>adil</u>) karena jika melakukan tindakan yang berlawanan dengan hal tersebut berarti melakukan tindakan korupsi ditinjau dari <u>dimensi politik</u> dan <u>sosiologi</u>.</p> <p>Para tokoh juga bersatu padu, walaupun mereka berasal dari berbagai negara, mereka tidak menunjukkan persaingan yang tidak sehat dan menghindari dari sikap boros (<u>hemat</u>) dalam memanfaatkan fasilitas seperti kertas, waktu, dan dana. Hal-hal yang dibicarakan selalu mengacu kepada kepentingan umum. (<u>dimensi ekonomi</u>)</p> <p>Di samping itu, perilaku yang perlu dicontoh dari para tokoh pembuat keputusan adalah mereka selalu bermusyawarah dalam memecahkan perbedaan pendapat, menjaga keaslian dokumen-dokumen yang dihasilkan. Para tokoh juga secara ikhlas mengorbankan tenaga, waktu, dan pemikiran. Karena mereka berpikir bahwa kepentingan bersama antar negara yang dihasilkan jauh lebih penting dibanding kepentingan lokal. (<u>dimensi hukum</u>)</p> <p>Dampak positif dari organisasi yang telah dibentuk (ASEAN) di bidang ekonomi adalah sesama anggota ASEAN dapat bekerja sama untuk saling membeli atau menjual produk masing-masing ke negara sesama anggota. Jika kerjasama itu dilakukan dengan <i>komitmen</i></p>

STANDAR KOMPETENSI	KOMPETENSI DASAR	KLS/ SMT	PENDIDIKAN ANTI KORUPSI		MODEL INTEGRASI
			ASPEK DAN INDIKATOR	NILAI ACUAN	
					<p><i>yang tinggi, jujur, dan tanggung jawab</i>, maka akan menambah kesejahteraan di masing-masing negara. Dilihat dari <u>dimensi ekonomi</u> kerjasama ini sangat menguntungkan.</p> <p>Namun, segala bentuk kerja sama jika tidak dirawat dengan baik akan mengakibatkan persaingan yang tidak sehat. Persaingan yang tidak sehat juga akan berdampak menghalalkan segala cara, seperti melakukan suap, penyimpangan aturan, penggelapan pajak (<u>dimensi hukum</u>). semua tindakan itu sangat bertentangan dengan <u>nilai kejujuran, tanggung jawab dan keadilan</u>.</p> <p>Sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bangsa Indonesia telah menunjukkan jati dirinya bahwa bangsa Indonesia cinta damai. Karena sebagai bangsa, Indonesia menyadari bahwa tidak mungkin hidup sendiri. Oleh karena itu perlu menjalin kerja sama dengan negara lain.</p> <p>Namun, dalam menjalin kerja sama tidak sebebaskan-bebasnya ada prinsip-prinsip yang harus ditaati bersama. Prinsip-prinsip tersebut antara lain, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, menghormati kedaulatan negara lain, hidup berdampingan secara damai, dan bekerja sama yang saling menguntungkan. Tetapi pada praktiknya ada saja negara-negara yang melanggar prinsip-prinsip kerja sama yang telah disepakati. Sebagai contoh ada negara besar yang seolah-olah memberikan bantuan kepada negara berkembang atau negara</p>

STANDAR KOMPETENSI	KOMPETENSI DASAR	KLS/ SMT	PENDIDIKAN ANTI KORUPSI		MODEL INTEGRASI
			ASPEK DAN INDIKATOR	NILAI ACUAN	
					<p>miskin. Tetapi dibalik itu negara tersebut ingin mencampuri lebih jauh kepentingan dalam negeri. Contoh lain misalnya kasus Ambalat, jelas kasus ini merupakan pelecehan terhadap bangsa Indonesia karena pulau itu merupakan bagian dari wilayah NKRI. (<u>dimensi politik dan hukum</u>). Jika kedua hal ini benar-benar terjadi maka kita harus <u>berani</u> mengemukakan pendapat dan berani membela kedaulatan negara kita sampai titik darah penghabisan. Peran Indonesia dalam lingkungan negara-negara ASEAN di masa kini adalah Indonesia turut serta mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengembangkan kerja sama sosial budaya di kawasan Asia Tenggara melalui semangat <u>kebersamaan</u> dan <u>kepedulian</u>. Yang kedua, Indonesia ikut memperkokoh perdamaian dan stabilitas kawasan dengan menjunjung tinggi rasa keadilan dan norma hukum masing-masing negara. (<u>kepemilikan</u>), (<u>dimensi politik dan hukum</u>)</p>
4. Memahami peranan politik luar negeri Indonesia dalam era globalisasi	4.1 Menjelaskan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif		<b>1. Politik:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Membuat kebijakan didasarkan pada kepentingan umum/bersama bukan ambisi pribadi yang menguntungkan kelompok tertentu</li> <li>Tidak melaksanakan kebijakan yang didasari</li> </ol>	<p>KESETARAAN: kesejajaran, sama tingkatan/kedudukan, sebanding, sepadan, seimbang.</p> <p>KEBERSAMAAN: Hal bersama, seperti rasa persaudaraan, kekeluargaan, senasib sepenanggungan dan merasa menjadi satu kesatuan (integritas).</p> <p>HEMAT: berhati-hati dalam</p>	<p>Dalam kancah kehidupan internasional bangsa Indonesia menganut sistem politik yang bebas dan aktif. Mengapa bangsa Indonesia menganut sistem ini, karena bangsa Indonesia ingin hidup bebas tidak terikat kepada salah satu negara, tidak ingin membedakan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Bangsa Indonesia ingin hidup bersama dengan siapa pun. Cikal bakal berkembangnya politik yang bebas dan aktif adalah diawali dengan</p>

STANDAR KOMPETENSI	KOMPETENSI DASAR	KLS/ SMT	PENDIDIKAN ANTI KORUPSI		MODEL INTEGRASI
			ASPEK DAN INDIKATOR	NILAI ACUAN	
			<p>oleh sikap <i>Clientelistik</i> (janji-janji dengan hadiah supaya mengikuti kemauannya)</p> <p>c. Tidak terbang pilih.</p> <p><b>2. Sosiologi:</b></p> <p>a. Tidak melakukan deskriminasi</p> <p>b. Tidak melakukan nepotisme</p> <p>c. Tidak melakukan kolusi.</p> <p><b>3. Ekonomi:</b></p> <p>a. Melakukan persaingan yang sehat demi keberhasilan</p> <p>b. Tida menerima suap</p> <p>c. Tidak boros dalam memanfaatkan sumber daya.</p> <p><b>4. Hukum:</b></p> <p>a. Tidak melakukan penggelapan.</p> <p>b. Tidak melakukan pemalsuan</p> <p>c. Tidak melakukan pencurian</p> <p>d. Tidak melakukan penipuan</p> <p>e. Tidak melakukan persekongkolan</p>	<p>membelanjakan uang, tidak boros, cermat.</p> <p>BIJAKSANA: selalu menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuannya), arif, tajam pikiran, pandai dan hati-hati (cermat, teliti, dsb.)</p> <p>IKHLAS: bersih hati, tulus hati.</p> <p>TANGGUNG JAWAB: keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb. Misalnya berani dan siap menerima resiko, amanah, tidak mengelak, dan berbuat yang terbaik), hak fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain, melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh.</p> <p>DISIPLIN: tata tertib, ketaatan (kepatuhan) pada peraturan, tepat waktu, tertib, dan konsisten.</p> <p>JUJUR: lurus hati, tidak curang, tulus, dapat dipercaya, berkata dan bertindak benar, mengungkapkan sesuatu sesuai dengan kenyataan (tidak berbohong), dan punya niat yang lurus terhadap setiap tindakan.</p>	<p>konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955 dan Indonesia sebagai pemrakarsa.</p> <p><i>Sikap yang perlu diteladani dari peristiwa ini adalah nilai-nilai juang para tokoh yang berperan dalam pembentukan organisasi tersebut. Kecuali nilai juang, masih ada nilai-nilai yang lain yang perlu kita teladani yaitu: nilai tanggung jawab, disiplin, jujur, dan kerja keras, kebersamaan, persatuan dalam perbedaan, musyawarah, toleransi, saling menghargai pendapat, rela mengorbankan tenaga, waktu dan pemikiran demi terwujudnya suatu organisasi yang dapat menjadi wahana untuk meningkatkan kerja sama negara-negara di kawasan internasional.. (dimensi politik)</i></p> <p>Kebersamaan selalu ditunjukkan oleh para tokoh yang hadir. ia selalu menghindarkan diri dari perilaku seperti ambisi untuk kepentingan pribadi maupun negaranya sendiri mencari keuntungan pribadi, dan tidak ada janji-janji atau tuntutan dari para tokoh di kemudian hari, karena jika melakukan tindakan yang berlawanan dengan hal tersebut berarti melakukan tindakan korupsi ditinjau dari dimensi politik dan sosiologi.</p> <p>Para tokoh ketika bersidang, menunjukkan sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Pimpinan sidang selalu memberi kesempatan kepada tokoh dari seluruh negara yang hadir, tidak ada deskriminasi dalam sidang. Oleh karena itu, menghasilkan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. (dimensi sosiologi)</p>

STANDAR KOMPETENSI	KOMPETENSI DASAR	KLS/ SMT	PENDIDIKAN ANTI KORUPSI		MODEL INTEGRASI
			ASPEK DAN INDIKATOR	NILAI ACUAN	
				<p>KERJA KERAS: kegiatan melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, pantang menyerah/ulet dan semangat dalam berusaha.</p> <p>ADIL : sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak /tidak pilih kasih, berpihak/berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang, seimbang, netral, objektif dan proporsional.</p> <p>PEDULI: mengindahkan, memperhatikan (empati), menghiraukan, menolong, toleran, senasib sepenanggungan, setia kawan, membela, rasa persaudaraan, memahami dan menghargai perasaan orang lain dan memperlakukan orang lain sebaik-baiknya.</p>	<p>Para tokoh juga bersatu padu, walaupun mereka berasal dari berbagai negara, mereka tidak menunjukkan persaingan yang tidak sehat dan menghindari dari sikap boros dalam memanfaatkan fasilitas yang tersedia. (<u>dimensi ekonomi</u>)</p> <p>Di samping itu, perilaku yang perlu dicontoh dari para tokoh adalah mereka selalu <i>komitmen</i> dalam melaksanakan seluruh keputusan yang telah dihasilkan. Seluruh perbedaan pendapat yang terjadi pada saat sidang ditinggalkan. Demi kepentingan umum mereka tidak berpikir untung dan rugi terhadap keputusan yang telah diputuskan. (<u>dimensi hukum</u>)</p> <p>Dampak dari organisasi yang telah dibentuk dari Konferensi Asia Afrika yang sekarang berkembang menjadi gerakan nonblok, bidang ekonomi adalah sesama anggota dapat bekerja sama untuk saling membeli atau menjual produk masing-masing ke negara sesama anggota. Jika kerjasama itu dilakukan dengan <u>komitmen</u> yang tinggi maka akan menambah kesejahteraan rakyat di masing-masing negara. Dilihat dari dimensi ekonomi kerjasama ini sangat menguntungkan.</p> <p>Sikap para pemimpin dalam membentuk organisasi baru itu menunjukkan sikap yang <u>berani</u> karena mereka yakin bahwa meskipun berbeda bangsa tetapi mereka sebagai manusia pasti mempunyai rasa <u>senasib dan sepenanggungan</u>.</p>

STANDAR KOMPETENSI	KOMPETENSI DASAR	KLS/ SMT	PENDIDIKAN ANTI KORUPSI		MODEL INTEGRASI
			ASPEK DAN INDIKATOR	NILAI ACUAN	
	4.2 Memberikan contoh peranan politik luar negeri Indonesia dalam percaturan internasional		<p><b>1. Politik:</b></p> <p>a. Membuat kebijakan didasarkan pada kepentingan umum/bersama bukan ambisi pribadi yang menguntungkan kelompok tertentu</p> <p>b. Tidak melaksanakan kebijakan didasari oleh sikap <i>Clientelistik</i> (janji-janji dengan hadiah supaya mengikuti kemauannya)</p> <p>c. Tebang pilih.</p> <p><b>2. Sosiologi</b></p> <p>a. Tidak melakukan deskriminasi</p> <p>b. Tidak melakukan nepotisme</p> <p>c. Tidak melakukan kolusi.</p> <p><b>3. Ekonomi:</b></p> <p>a. Melakukan persaingan yang sehat demi keberhasilan</p> <p>b. Tidak menerima suap</p> <p>c. Tidak boros dalam memanfaatkan sumber daya</p> <p><b>4. Hukum:</b></p> <p>a. Tidak melakukan penggelapan.</p>	<p>KEBERSAMAAN: Hal bersama, seperti rasa persaudaraan, kekeluargaan, senasib sepenanggungan dan merasa menjadi satu kesatuan (integritas).</p> <p>KONSEKUEN: sesuai dengan apa yang dikatakan/diperbuat, berwatak teguh, tidak menyimpang dari apa yang sudah diputuskan</p> <p>SPORTIF: bersifat kesatria, jujur, tegak (tetap pendirian, tetap memegang keadilan).</p> <p>TANGGUNG JAWAB: keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb. Misalnya berani dan siap menerima resiko, amanah, tidak mengelak, dan berbuat yang terbaik), hak fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain, melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh.</p> <p>DISIPLIN: tata tertib, ketaatan (kepatuhan) pada peraturan, tepat waktu, tertib, dan konsisten.</p> <p>JUJUR: lurus hati, tidak curang, tulus, dapat dipercaya, berkata dan bertindak benar, mengungkapkan</p>	<p>Indonesia merupakan pemrakarsa penyelenggaraan Konferensi Asia- Afrika (KAA). KAA adalah pertemuan antara negara-negara Benua Asia dan Benua Afrika. Pada waktu itu, negara-negara tersebut kebanyakan baru merdeka. Negara-negara tersebut berkumpul untuk menghasilkan beberapa kesepakatan. Salah satunya adalah untuk mewujudkan perdamaian dunia. KAA diselenggarakan di Bandung, Jawa Barat. KAA merupakan salah satu wujud Politik Bebas-Aktif Indonesia dalam tingkat internasional. Kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah KAA merupakan bentuk <u>tanggung jawab</u> sebagai bangsa KAA merupakan salah satu upaya mewujudkan perdamaian dunia. Kepedulian Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia merupakan bukti nyata bahwa Indonesia telah membuat kebijakan yang didasarkan pada kepentingan bangsa secara umum bukan ambisi pribadi yang menguntungkan bangsa sendiri. (<u>dimensi politik</u>) Dilihat dari sisi ekonomi kerjasama yang dihasilkan oleh KAA adalah sangat menguntungkan karena dapat meningkatkan kerja sama di bidang perdagangan sehingga dapat mempercepat penjualan produk tiap-tiap negara.</p>

STANDAR KOMPETENSI	KOMPETENSI DASAR	KLS/ SMT	PENDIDIKAN ANTI KORUPSI		MODEL INTEGRASI
			ASPEK DAN INDIKATOR	NILAI ACUAN	
			b. Tidak melakukan pemalsuan c. Tidak melakukan pencurian d. Tidak melakukan penipuan e. Tidak melakukan persekongkolan	sesuatu sesuai dengan kenyataan (tidak berbohong), dan punya niat yang lurus terhadap setiap tindakan.	



## B. PENGINTEGRASIAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SILABUS

### CONTOH INTEGRASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SILABUS SEKOLAH DASAR / MADRASAH IBTIDAIYAH (SD/MI)

**Satuan Pendidikan** : SD/MI Indonesia  
**Mata Pelajaran** : Pendidikan Kewarganegaraan  
**Kelas/Semester** : VI/I  
**Alokasi Waktu** : 4 x 35 menit

**Standar Kompetensi** : 1. Menghargai Nilai-Nilai Juang Dalam Proses Perumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara.

KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR	MATERI PEMBELAJARAN	KEGIATAN PEMBELAJARAN	PENILAIAN	ALOKASI WAKTU	SUMBER/BAHAN/ALAT
1.1 Mendeskripsikan nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara.	1. Menjelaskan arti Pancasila sebagai dasar negara. 2. Menceritakan proses perumusan Pancasila. 3. Mengidentifikasi nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila. 4. Menunjukkan contoh perilaku nilai juang dalam proses perumusan Pancasila. 5. <u>Menunjukkan contoh sikap seperti</u>	1. Pancasila sebagai dasar negara. 2. Proses perumusan Pancasila. 3. Nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila. 4. Contoh perilaku nilai juang dalam proses perumusan Pancasila. 5. <u>Contoh sikap kesetaraan, kebersamaan, jujur, dan rela berkorban dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara..</u>	1. Menggali informasi tentang arti Pancasila sebagai dasar negara. 2. Membaca buku PKn untuk SD/MI kelas VI dan berdiskusi tentang proses perumusan Pancasila. 3. Mencari informasi dan berdiskusi tentang nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila. 4. Mengkaji peristiwa, mengamati perilaku tentang perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila.	1. Tes tertulis bentuk pilihan ganda. 2. Sikap dalam bentuk skala sikap.	2 JP @ 35 menit	1. Najib Sulhan, 2008, <i>Mari Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SD/MI Kelas VI</i> , Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional.  2. Sunarso, Anis Kusumawardani, 2008, <i>Pendidikan Kewarganegaraan SD/MI Kelas VI</i> , Jakarta, Departemen Pendidikan

KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR	MATERI PEMBELAJARAN	KEGIATAN PEMBELAJARAN	PENILAIAN	ALOKASI WAKTU	SUMBER/BAHAN/ ALAT
	<u>kesetaraan, kebersamaan, jujur, dan rela berkorban dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara..</u>		5. <u>Berdiskusi tentang tindakan yang harus dicontoh karena sesuai dengan nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, seperti kesetaraan, kebersamaan, jujur, dan rela berkorban dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara..</u>			Nasional.
1.2 Meneladani nilai-nilai juang para tokoh yang berperan dalam proses perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara dalam kehidupan sehari-hari	1. Mengidentifikasi bentuk-bentuk perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. 2. Mengidentifikasi macam-macam nilai juang para tokoh yang berperan dalam perumusan Pancasila. 3. Menunjukkan perilaku keteladanan sesuai nilai-nilai juang para tokoh proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan sehari-hari	1. Bentuk-bentuk perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. 2. Macam-macam nilai juang para tokoh yang berperan dalam perumusan Pancasila. 3. Perilaku keteladanan sesuai nilai-nilai juang para tokoh proses perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara dalam kehidupan sehari-hari. 4. <u>Contoh sikap kerja keras, komitmen, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.</u>	1. Menggali informasi tentang bentuk-bentuk perjuangan untuk mencapai kemerdekaan 2. Membaca buku PKn untuk SD/MI kelas VI dan berdiskusi tentang macam-macam nilai juang para tokoh yang berperan dalam perumusan Pancasila 3. Menggali informasi dan berdiskusi tentang perilaku keteladanan sesuai nilai-nilai juang para tokoh proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan sehari-hari. 4. <u>Berdiskusi tentang perilaku</u>	1. Tes tertulis bentuk pilihan ganda, Isian, dan uraian. 2. Sikap dalam bentuk skala sikap.	2 JP @ 35 menit	1. Najib Sulhan, 2008, <i>Mari Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SD/MI Kelas VI</i> , Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional.  2. Sunarso, Anis Kusumawardani, 2008, <i>Pendidikan Kewarganegaraan SD/MI Kelas VI</i> , Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional.

KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR	MATERI PEMBELAJARAN	KEGIATAN PEMBELAJARAN	PENILAIAN	ALOKASI WAKTU	SUMBER/BAHAN/ALAT
	4. <u>Menunjukkan contoh sikap kerja keras, komitmen, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.</u>		<u>dan sikap kerja keras, komitmen, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.</u>			

**Standar Kompetensi** : 2. Memahami Sistem Pemerintahan Republik Indonesia.

KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR	MATERI PEMBELAJARAN	KEGIATAN PEMBELAJARAN	PENILAIAN	ALOKASI WAKTU	SUMBER/BAHAN/ALAT
2.1 Menjelaskan proses Pemilu dan Pilkada	1. Menjelaskan arti negara demokrasi. 2. Menganalisis pentingnya Pemilu dalam negara demokrasi. 3. Mengidentifikasi macam-macam Pemilu dan Pilkada 4. Menjelaskan tujuan Pemilu dan Pilkada 5. Mendeskripsikan tahap-tahap penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. 6. <u>Menunjukkan sikap jujur, sportif, konsekuen. dalam proses Pemilu</u>	1. Arti negara demokrasi. 2. Pentingnya Pemilu dalam negara demokrasi. 3. Macam-macam Pemilu dan Pilkada (Pilihan presiden, pilihan gubernur, pilihan bupati) 4. Tujuan Pemilu dan Pilkada 5. Tahap-tahap penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. 6. <u>Contoh sikap jujur, sportif, konsekuen. dalam proses Pemilu maupun Pilkada.</u>	1. Menggali informasi tentang arti negara demokrasi. 2. Mencari informasi dan berdiskusi tentang pentingnya Pemilu dalam negara demokrasi. 3. Berdiskusi tentang macam-macam Pemilu dan Pilkada 4. Menganalisis tujuan Pemilu dan Pilkada 5. Mendeskripsikan tahap-tahap penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. 6. <u>Menggali informasi dan berdiskusi tentang sikap jujur, sportif, konsekuen. dalam proses Pemilu maupun Pilkada.</u>	1. Tes tertulis bentuk Pilihan Ganda, Uraian 2. Sikap dalam bentuk skala sikap. 3. Tugas membuat Kliping tentang Pemilu dan Pilkada	4 JP @ 35 menit	1. Najib Sulhan, 2008, <i>Mari Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SD/MI Kelas VI</i> , Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional. 2. Sunarso, Anis Kusumawardani, 2008, <i>Pendidikan Kewarganegaraan SD/MI Kelas VI</i> , Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional.

KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR	MATERI PEMBELAJARAN	KEGIATAN PEMBELAJARAN	PENILAIAN	ALOKASI WAKTU	SUMBER/BAHAN/ALAT
	<u>maupun Pilkada.</u>					
2.2 Mendeskripsikan tugas dan fungsi pemerin-tahan pusat dan daerah	1. Menjelaskan pengertian pemerintah pusat dan daerah. 2. Mengidentifikasi landasan hukum pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 3. Menjelaskan asas pemerintahan daerah. 4. Mendeskripsikan wewenang pemerintah pusat atau daerah. 5. Membandingkan sistem pemerintahan desentralisasi dan sentralisasi. 6. Mengidentifikasi hak pemerintahan daerah. 7. Mengidentifikasi kewajiban pemerintahan daerah. 8. <u>Menunjukkan contoh sikap menghemat, jujur,</u>	1. Pengertian pemerintah pusat dan daerah. 2. Landasan hukum pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 3. Asas pemerintahan daerah. 4. Wewenang pemerintah pusat atau daerah. 5. Perbedaan sistem pemerintahan desentralisasi dan sentralisasi. 6. Hak pemerintahan daerah. 7. Kewajiban pemerintahan daerah. 8. <u>Contoh sikap menghemat, jujur, adil, dan disiplin. dalam penyelenggaraan pemerintahan.</u>	1. Menganalisis pengertian pemerintah pusat dan daerah 2. Menggali informasi dan berdiskusi tentang landasan hukum pemerintah pusat dan pemerintah daerah 3. Menggali informasi dan berdiskusi tentang asas pemerintahan daerah 4. Mendeskripsikan wewenang pemerintah pusat atau daerah. 5. Menganalisis sistem pemerintahan desentralisasi dan sentralisasi 6. Mengidentifikasi hak pemerintahan daerah. 7. <u>Menggali informasi dan berdiskusi tentang perilaku yang harus dihindari dalam penyelenggaraan pemerintahan. (Misalnya: tidak mau menghemat, tidak jujur, tidak adil, tidak disiplin.</u> 8. <u>Mendiskusikan sikap menghemat, jujur, adil, dan disiplin. dalam</u>	1. Tes tertulis bentuk Pilihan Ganda, Uraian 2. Sikap dalam bentuk skala sikap.	4 JP @ 35 menit	1. Najib Sulhan, 2008, <i>Mari Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SD/MI Kelas VI</i> , Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional. 2. Sunarso, Anis Kusumawardani, 2008, <i>Pendidikan Kewarganegaraan SD/MI Kelas VI</i> , Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional.

KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR	MATERI PEMBELAJARAN	KEGIATAN PEMBELAJARAN	PENILAIAN	ALOKASI WAKTU	SUMBER/BAHAN/ALAT
	<u>adil, dan disiplin.</u> <u>dalam</u> <u>penyelenggaraan</u> <u>pemerintahan.</u>		<u>penyelenggaraan</u> <u>pemerintahan.</u>			

**Satuan Pendidikan** : Sekolah Dasar  
**Mata Pelajaran** : Pendidikan Kewarganegaraan  
**Kelas/Semester** : VI/II  
**Alokasi Waktu** : 4 x 35 menit

**Standar Kompetensi** : 3. Memahami peran Indonesia dalam lingkungan negara-negara di Asia Tenggara

KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR	MATERI PEMBELAJARAN	KEGIATAN PEMBELAJARAN	PENILAIAN	ALOKASI WAKTU	SUMBER/BAHAN/ALAT
3.1 Menjelaskan pengertian kerja sama Negara-negara Asia Tenggara	1. Menjelaskan proses terjadinya deklarasi Bangkok 2. Menuliskan bentuk kerjasama Negara-negara ASEAN 3. Menjelaskan cara kerjasama antar negara ASEAN 4. <u>Menunjukkan contoh sikap jujur, komitmen, dan sportif dalam kerja sama antar negara ASEAN.</u>	1. Proses terjadinya deklarasi Bangkok 2. Bentuk kerjasama Negara-negara ASEAN 3. Cara kerjasama antar negara ASEAN. 4. <u>Contoh sikap jujur, komitmen, dan sportif, dalam kerja sama. antar negara ASEAN.</u>	1. Mendeskripsikan proses terjadinya deklarasi Bangkok. 2. Menggali informasi dan mendiskusikan bentuk kerjasama negara-negara ASEAN. 3. Menggali informasi cara kerja sama antar negara ASEAN. 4. <u>Mengidentifikasi sikap jujur, komitmen, dan sportif dalam kerja sama. antar negara ASEAN.</u>	1. Tes tertulis bentuk Pilihan Ganda, Uraian 2. Sikap dalam bentuk skala sikap.	4 JP @ 35 menit	1. Najib Sulhan, 2008, <i>Mari Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SD/MI Kelas VI</i> , Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional. 2. Sunarso, Anis Kusumawardani, 2008, <i>Pendidikan Kewarganegaraan SD/MI Kelas VI</i> , Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional.
3.2 Memberikan contoh peran Indonesia dalam lingkungan Negara-negara Asia Tenggara	1. Menjelaskan peran Indonesia melalui ASEAN 2. Menyebutkan tujuan pendirian dan bentuk-bentuk kerja	1. Peran Indonesia dalam lingkungan Asia Tenggara 2. Tujuan pendirian dan bentuk-bentuk kerja sama ASEAN. 3. Bentuk-bentuk kerja sama	1. Mengidentifikasi peran Indonesia di Asia Tenggara 2. Mengidentifikasi dan mendiskusikan tujuan dan bentuk ASEAN.	1. Tes tertulis bentuk Pilihan Ganda. 2. Sikap dalam bentuk skala sikap.	4 JP @ 35 menit	1. Najib Sulhan, 2008, <i>Mari Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SD/MI Kelas VI</i> , Jakarta,

KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR	MATERI PEMBELAJARAN	KEGIATAN PEMBELAJARAN	PENILAIAN	ALOKASI WAKTU	SUMBER/BAHAN/ALAT
	sama ASEAN 3. Menyebutkan bentuk-bentuk kerja sama Indonesia dengan negara lain di Asia Tenggara. 4. <u>Menunjukkan contoh sikap menghargai kesetaraan, komitmen, konsekuen, mau berbagi, adil dalam menjalin kerja sama.</u>	Indonesia dengan negara lain di Asia Tenggara. 4. <u>Contoh sikap menghargai kesetaraan, komitmen, konsekuen, mau berbagi, adil dalam menjalin kerja sama.</u>	3. Menggali informasi dan mendiskusikan bentuk kerja sama Indonesia dengan negara lain di Asia Tenggara. 4. <u>Berdiskusi tentang sikap menghargai kesetaraan, komitmen, konsekuen, mau berbagi, adil dalam menjalin kerja sama.</u>			Departemen Pendidikan Nasional.  2. Sunarso, Anis Kusumawardani, 2008, <i>Pendidikan Kewarganegaraan SD/MI Kelas VI</i> , Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional.

**Standar Kompetensi** : 4. Memahami peranan politik luar negeri Indonesia dalam era globalisasi.

KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR	MATERI PEMBELAJARAN	KEGIATAN PEMBELAJARAN	PENILAIAN	ALOKASI WAKTU	SUMBER/BAHAN/ALAT
4.1 Menjelaskan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif	1. Menjelaskan pengertian politik bebas aktif 2. Menjelaskan peranan Indonesia dalam beberapa organisasi internasional. 3. Menjelaskan peran Indonesia di era global.	1. Pengertian politik bebas aktif 2. Peran Indonesia dalam beberapa organisasi internasional 3. Peran Indonesia di era global. 4. Keuntungan dan kerugian peran politik Indonesia. 5. <u>Sikap adil, tidak diskriminatif, sportif,</u>	1. Menggali informasi tentang politik bebas aktif dari berbagai sumber. (dari buku, internet, dll) 2. Menggali informasi tentang peranan Indonesia dan mendiskusikan beberapa organisasi internasional. 3. Menggali dan mendiskusikan informasi tentang peranan Indonesia	1. Tes tertulis bentuk Pilihan Ganda, Uraian. 2. Sikap dalam bentuk skala sikap.	4 JP @ 35 menit	1. Najib Sulhan, 2008, <i>Mari Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SD/MI Kelas VI</i> , Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional.  2. Sunarso, Anis

KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR	MATERI PEMBELAJARAN	KEGIATAN PEMBELAJARAN	PENILAIAN	ALOKASI WAKTU	SUMBER/BAHAN/ALAT
	4. Menemukan keuntungan dan kerugian peran politik Indonesia. 5. <u>Menunjukkan contoh sikap adil, tidak diskriminatif, sportif, disiplin, tanggung jawab dalam hubungan antar bangsa/negara.</u>	<u>disiplin, tanggung jawab dalam hubungan antar bangsa/negara.</u>	di era global. 4. Mengidentifikasi dan mendiskusikan keuntungan dan kerugian politik yang dianut bangsa Indonesia. 5. <u>Mendiskusikan sikap adil, tidak diskriminatif, sportif, disiplin, tanggung jawab dalam hubungan antar bangsa/negara.</u>			Kusumawardani, 2008, <i>Pendidikan Kewarganegaraan SD/MI Kelas VI</i> , Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional.
4.2 Memberikan contoh peranan politik luar negeri Indonesia dalam percaturan internasional	1. Menjelaskan peran politik Indonesia dalam percaturan politik internasional 2. Menyebutkan salah satu contoh peran politik Indonesia dalam percaturan politik internasional 3. Menuliskan keuntungan dan kerugian peran politik Indonesia dalam percaturan politik internasional. 4. <u>Menunjukkan contoh sikap menghargai kesetaraan dan menghargai</u>	1. Peran politik Indonesia dalam percaturan internasional. 2. Contoh peran politik Indonesia dalam percaturan politik internasional. 3. Berbagai contoh keuntungan dan kerugian Indonesia dalam percaturan politik internasional. 4. <u>Contoh sikap menghargai kesetaraan dan kepemilikan dalam kehidupan berpolitik antar bangsa.</u>	1. Menggali informasi tentang politik Indonesia dalam percaturan politik Indonesia dari berbagai sumber.(dari buku, internet, dll) 2. Mendiskusikan peran politik Indonesia dalam percaturan internasional 3. Mencatat dan mendiskusikan keuntungan dan kerugian peran politik Indonesia dalam percaturan politik internasional. 4. <u>Mendiskusikan tindakan menghargai kesetaraan dan kepemilikan dalam kehidupan berpolitik antar bangsa.</u>	1. Tes tertulis bentuk Pilihan Ganda. 2. Sikap dalam bentuk skala sikap.	4 JP @ 35 menit	1.Najib Sulhan, 2008, <i>Mari Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SD/MI Kelas VI</i> , Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional.  2.Sunarso, Anis Kusumawardani, 2008, <i>Pendidikan Kewarganegaraan SD/MI Kelas VI</i> , Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional.



KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR	MATERI PEMBELAJARAN	KEGIATAN PEMBELAJARAN	PENILAIAN	ALOKASI WAKTU	SUMBER/BAHAN/ALAT
	<u>kepemilikan dalam kehidupan berpolitik antar bangsa.</u>					

## C. PENGINTEGRASIAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

### CONTOH 1 INTEGRASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA RPP SEKOLAH DASAR/ MADRASAH IBTIDAIYAH (SD/MI)

**Satuan Pendidikan** : SD/MI Indonesia  
**Mata Pelajaran** : Pendidikan Kewarganegaraan  
**Kelas** : VI (Enam)  
**Semester** : 1 (Satu)  
**Jumlah Pertemuan** : Dua kali (4 X 35 menit)

- I. Standar Kompetensi** : 1. Menghargai nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara.
- II. Kompetensi Dasar** : 1.1. Mendeskripsikan nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara

#### III. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Menjelaskan arti Pancasila sebagai dasar negara.
2. Menceritakan proses perumusan Pancasila.
3. Mengidentifikasi nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila
4. Menunjukkan contoh perilaku nilai juang dalam proses perumusan Pancasila.
5. Menunjukkan contoh perilaku yang harus diteladani karena termasuk perbuatan yang sesuai dengan nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, seperti: kebersamaan, jujur, dan rela berkorban.

#### IV. Tujuan Pembelajaran

Melalui kegiatan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, siswa dapat:

1. Menjelaskan arti Pancasila sebagai dasar negara.
2. Menceritakan proses perumusan Pancasila.
3. Mengidentifikasi nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila
4. Menunjukkan contoh perilaku nilai juang dalam proses perumusan Pancasila.
5. Menerapkan perilaku kebersamaan, jujur, dan rela berkorban dalam kehidupan sehari-hari.

#### V. Materi Ajar

1. Pancasila sebagai dasar negara.

2. Proses perumusan Pancasila.
3. Nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila
4. Contoh perilaku nilai juang dalam proses perumusan Pancasila.
5. Contoh perilaku kebersamaan, jujur, dan rela berkorban.

### **Integrasi Pendidikan Antikorupsi pada Materi Ajar**

Nilai, biasanya selalu berkaitan dengan hal-hal yang baik, bagus, indah, berguna, dan berharga. Nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila berarti hal-hal yang baik, yang indah, yang berharga ketika merumuskan Pancasila seperti kebersamaan, persatuan dalam perbedaan, rela berkorban demi tercapainya cita-cita bersama, yaitu terumuskannya dasar negara. Oleh karena itu, sebagai generasi muda harus berani dan rela berkorban untuk kepentingan umum/bersama.

Nilai juang yang ditampilkan oleh para tokoh perumus Pancasila selalu mengedepankan kepentingan umum/bangsa (dimensi politik) dan selalu menghindari perilaku ambisi pribadi dan tidak mencari keuntungan pribadi. Para perumus Pancasila juga tidak mengingkari janji yang sudah disepakati, tidak membedakan dalam memberi kesempatan berbicara. Ketika itu, semua yang hadir diberi hak untuk berpendapat.

Panitia perumus Pancasila saling *bekerjasama*, tidak ada persaingan yang tidak sehat, semua panitia bekerja keras, tidak boros waktu, menghemat biaya, dan makan seadanya. (dimensi ekonomi). Semua tim perumus Pancasila tidak melakukan perbuatan tercela seperti pemalsuan maupun penipuan dokumen-dokumen usulan dasar negara, baik usulan dari Moh. Yamin dan Ir. Soekarno tetap menjaga dari kerusakan terhadap dokumen-dokumen perumusan Pancasila. (jujur) Tindakan kurang terpuji tersebut harus dihindari karena merupakan bentuk korupsi dilihat dari aspek hukum

Dalam perumusan Pancasila tidak langsung jadi. Namun, ada beberapa tokoh, seperti Soepomo, Soekarno yang mengusulkan isi Pancasila. Dan masing-masing berbeda isinya. Usulan-usulan tersebut tidak langsung diterima oleh BPUPKI. Setiap usulan ditampung dan dimusyawarahkan bersama. Oleh karena itu, dibentuklah sebuah tim khusus. Tim tersebut kemudian berkembang menjadi sebuah panitia kecil yang terdiri atas sembilan orang. Mereka adalah Soekarno, Moh. Hatta, Moh. Yamin, Ahmad Soebardjo, A.A. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, K.H. Wachid Hasyim, H. Agus Salim, dan Abikoesno Tjokrosoejoso. Tim inilah yang kemudian disebut sebagai Panitia Sembilan. Panitia Sembilan bertugas membahas lebih lanjut usulan-

usulan tentang dasar negara. Dalam menerima usulan mereka mengembangkan sikap berani dan rela berkorban.

Peristiwa ini membuktikan bahwa Tim Sembilan tidak diskriminatif dalam pelayanan, karena semua tokoh diberi hak untuk mengemukakan pendapat. (dimensi sosiologi)

## VI. Alokasi Waktu

Pertemuan Pertama: 2 x 35 menit

Pertemuan Kedua : 2 x 35 menit

## VII. Metode Pembelajaran

Strategi *Cooperative Learning technique Think Paire and share* dengan metode Pembelajaran:

1. Penugasan
2. Diskusi
3. Tanya jawab
4. Kerja kelompok (*Group Assignment/work*)

## VIII. Kegiatan Pembelajaran

### Pertemuan Pertama

Tahap Kegiatan	Aktivitas Siswa/Guru
A. Pendahuluan (10 Menit)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam.</li><li>2. Guru mengamati kebersihan dan ketertiban kelas serta melakukan pengecekan kehadiran siswa.</li><li>3. Guru menyampaikan pokok bahasan dan tujuan pembelajaran hari ini.</li><li>4. Guru mengajak siswa untuk menyanyikan lagu " Garuda Pancasila".</li></ol>
B. Inti (55 Menit)	<ol style="list-style-type: none"><li><b>1. Eksplorasi</b><ol style="list-style-type: none"><li>a. Siswa dibagi dalam bentuk berpasang-pasangan kemudian diminta untuk membaca dan mengamati gambar serta lembar informasi yang disediakan oleh guru (terlampir).</li><li>b. Setiap pasangan belajar diberi tugas untuk membahas berikut ini:<ol style="list-style-type: none"><li>1) Arti Pancasila sebagai dasar negara.</li><li>2) Deskripsikan proses perumusan Pancasila.</li><li>3) Identifikasi nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila</li><li>4) Tunjukkan contoh perilaku nilai juang dalam proses perumusan Pancasila.</li><li>5) Tunjukkan contoh perilaku yang harus dihindari karena termasuk perbuatan korupsi dan bertentangan dengan nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara.</li></ol></li></ol></li><li><b>2. Elaborasi</b><p>Setiap pasangan belajar selesai memecahkan dan pembahasan permasalahan diminta untuk mencari pasangan belajar yang lain,</p></li></ol>

Tahap Kegiatan	Aktivitas Siswa/Guru
	<p>sehingga terbentuk kelompok kecil @ 4 orang dan ditugasi untuk saling berbagi pendapat/curah pendapat (sharing) dari hasil pemecahan masalah.</p> <p><b>3. Konfirmasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Setiap kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok dan kelompok lain menanggapi hasil presentasi tersebut.</li> <li>Guru mengklarifikasi dan meluruskan jika terjadi kesalahpahaman.</li> <li>Guru mengajukan pertanyaan “apakah ada yang belum dipahami oleh siswa.</li> <li>Guru bersama siswa membuat rangkuman hasil belajar.</li> </ol>
C. Penutup (5 Menit)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Guru menyimpulkan kembali materi yang telah dipelajari.</li> <li>Siswa diberi tugas untuk membuat karangan bebas tentang Satu Tokoh Perumus Pancasila.</li> <li>Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan salam.</li> </ol>

## Pertemuan Kedua

Tahap Kegiatan	Aktivitas Siswa/Guru
A. Pendahuluan (10 Menit)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Guru membuka pelajaran dengan salam.</li> <li>Guru mengamati kebersihan dan ketertiban kelas serta melakukan pengecekan kehadiran siswa.</li> <li>Guru menyampaikan pokok bahasan dan tujuan pembelajaran hari ini.</li> <li>Guru menanyakan hasil pekerjaan yang ditugaskan minggu lalu.</li> </ol>
B. Inti (55 Menit)	<p><b>Elaborasi dan Konfirmasi</b></p> <p>Berdasarkan tugas minggu lalu, maka guru:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Meminta supaya tugas dikumpulkan.</li> <li>Membentuk kelompok @ 4 orang dan ditugasi untuk mendiskusikan hasil tugas minggu lalu.</li> <li>Setiap kelompok secara musyawarah menentukan satu tokoh perumus Pancasila.</li> <li>Setiap kelompok menampilkan tokoh perumus Pancasila di depan kelas.</li> <li>Kelompok lain diperbolehkan memberikan komentar, pertanyaan maupun saran kepada kelompok yang tampil</li> <li>Guru memberikan penjelasan dan pelurusan.</li> <li>Guru bersama siswa membuat kesimpulan hasil belajar.</li> </ol>
C. Penutup (5 Menit)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Guru menyimpulkan kembali materi yang telah dipelajari.</li> <li>Guru mengingatkan agar siswa belajar dengan baik. untuk menghadapi ulangan pada pertemuan selanjutnya.</li> <li>Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan salam.</li> </ol>

## IX. Penilaian

### A. Penilaian Proses

#### Penilaian sikap.

Berilah tanda centang ( ✓ ) pada indikator sikap berikut ini!

No	Pernyataan	Indikator sikap			
		1	2	3	4
1.	Meneladani semangat juang para tokoh perumus Pancasila menjadi kewajiban setiap warga negara, karena mengandung nilai-nilai yang berguna dalam kehidupan sehari-hari				
2.	Musyawarah selalu dikedepankan dalam memecahkan perbedaan pendapat dalam proses perumusan Pancasila, karena musyawarah merupakan nilai luhur bangsa Indonesia.				
3.	Sebagai makhluk kolektivitas, prinsip persatuan diutamakan dalam keberagaman yang perlu diteladani oleh setiap orang Indonesia.				
4.	Ambisi pribadi bertentangan dengan nilai kebersamaan, karena perilaku tersebut hanya kepentingan pribadi saja.				
5.	Tidak menepati waktu, termasuk bentuk tindakan korupsi waktu, karena berakibat merugikan pihak lain.				
6.	Rela berkorban baik tenaga, waktu, maupun pemikiran, dalam rangka perumusan Pancasila seyogyanya menjadi motivasi para pemimpin negara dewasa ini.				

#### Pedoman Penskoran:

Mencontreng angka 1 = sangat tidak setuju

Mencontreng angka 2 = kurang setuju

Mencontreng angka 3 = setuju

Mencontreng angka 4 = sangat setuju

Skor maksimum seluruh soal sikap = 4 X 6 item = 24

Skor minimum seluruh soal sikap = 1 X 6 = 6.

$$\text{Nilai sikap} = \frac{\text{Jumlah perolehan skor}}{\text{Jumlah skor maksimum}} \times \text{nilai ideal}$$

Kriteria Sikap:

86 – 100 = sangat baik.

76 – 85 = baik

66 – 70 = cukup.

≤ 65 = kurang

#### B. Penilaian Hasil

**Tes Tulis bentuk uraian.**

1. Jelaskan arti Pancasila sebagai dasar negara!
2. Deskripsikan proses perumusan Pancasila!
3. Identifikasi nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila!

4. Tunjukkan contoh perilaku nilai juang dalam proses perumusan Pancasila!
5. Tunjukkan perilaku yang harus dihindari karena bertentangan dengan nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara!

***Pedoman Penskoran:***

1. Bila jawaban sangat sempurna diberi skor 4
2. Bila jawaban sempurna diberi skor 3
3. Bila jawaban kurang sempurna diberi skor 2
4. Bila jawaban tidak sempurna diberi skor 1

Skor maksimum seluruh soal sikap = 4 X 5 item = 20

Skor minimum seluruh soal sikap 1 X 5 = 5

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah perolehan skor}}{\text{Jumlah skor maksimum}} \times \text{nilai ideal}$$

Nilai ideal = 100

**X. Sumber Belajar**

1. Najib Sulhan, 2008, *Mari Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SD/MI Kelas VI*, Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional.
2. Sunarso, Anis Kusumawardani, 2008, *Pendidikan Kewarganegaraan SD/MI Kelas VI*, Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional.
3. Lembar Informasi dan Gambar yang berkaitan dengan materi

....., .....2011

Mengetahui

Guru PKn Kelas VI

Kepala Sekolah

---



---

## LEMBAR INFORMASI

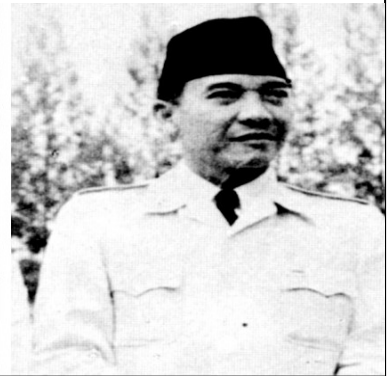
Amati dan bacalah dengan baik makna gambar berikut ini jika dikaitkan dengan usaha bela negara!



Ir. Soekarno salah satu tokoh pemersatu bangsa Indonesia



M. Hatta, tokoh yang mengusulkan perubahan Piagam Jakarta. Sumber: Buku PKn SD/MI Kelas VI terbitan Depdiknas



Tokoh-tokoh peletak dasar negara yaitu M. Yamin, Soepomo, Ir. Soekarno  
Sumber: Buku Elektronik Terbitan Depdiknas Mata Pelajaran PKn untuk SD/MI kelas VI



Kerjasama pembuatan sanitasi warga Desa sebagai wujud semangat juang tokoh perumus Pancasila



Bhinnika Tunggal Ika menjadi semboyan Persatuan Indonesia



**CONTOH 2**  
**INTEGRASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA RPP**  
**SEKOLAH DASAR/ MADRASAH IBTIDAIYAH (SD/MI)**

**Satuan Pendidikan** : SD Indonesia  
**Mata Pelajaran** : Pendidikan Kewarganegaraan  
**Kelas** : VI (Enam)  
**Semester** : II (dua)  
**Jumlah Pertemuan** : 2 X (4 X 35 menit)

- I. Standar Kompetensi** : 3. Memahami peran Indonesia dalam lingkungan negara-negara di Asia Tenggara
- II. Kompetensi Dasar** : 3.2 Memberikan contoh peran Indonesia dalam lingkungan negara-negara Asia Tenggara

**III. Indikator Pencapaian Kompetensi:**

1. Menjelaskan latar belakang terbentuknya organisasi ASEAN.
2. Menyebutkan negara-negara anggota ASEAN.
3. Menjelaskan peran Indonesia melalui ASEAN
4. Mengidentifikasi tujuan pendirian ASEAN
5. Menyebutkan bentuk-bentuk kerja sama Indonesia dengan negara lain di Asia Tenggara.
6. Menyebutkan para tokoh pendiri ASEAN.
7. Menjelaskan peran Indonesia dalam mengatasi perselisihan antar negara tetangga.
8. Menunjukkan contoh perilaku komitmen, konsekuen, adil, dan kebersamaan dalam menjalin hubungan dengan negara tetangga.

**IV. Tujuan Pembelajaran:**

Melalui kegiatan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, siswa dapat/mampu:

1. Menjelaskan latar belakang terbentuknya organisasi ASEAN.
2. Menyebutkan negara-negara anggota ASEAN.
3. Menjelaskan peran Indonesia melalui ASEAN
4. Mengidentifikasi tujuan pendirian ASEAN
5. Menyebutkan bentuk-bentuk kerja sama Indonesia dengan negara lain di Asia Tenggara.

6. Menyebutkan para tokoh pendiri ASEAN.
7. Menjelaskan peran Indonesia dalam mengatasi perselisihan antar negara tetangga.
8. Menerapkan perilaku komitmen, konsekuen, adil, dan kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari.

## V. Materi Ajar

1. Latar belakang terbentuknya organisasi ASEAN.
2. Negara-negara anggota ASEAN.
3. Peran Indonesia melalui ASEAN
4. Tujuan pendirian ASEAN
5. Bentuk-bentuk kerja sama Indonesia dengan negara lain di Asia Tenggara.
6. Tokoh-tokoh pendiri ASEAN.
7. Peran Indonesia dalam mengatasi perselisihan antar negara tetangga
8. Contoh perilaku komitmen, konsekuen, adil, dan kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari.

## Integrasi Pendidikan Anti Korupsi pada Materi Ajar:

Secara geografis Indonesia terletak di kawasan Asia Tenggara. Sejak dahulu Indonesia telah menjalin hubungan baik dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Sebagai contoh Indonesia telah menjadi pemrakarsa berdirinya organisasi ASEAN (Association of South Asian Nation) yang diterjemahkan menjadi Perbara (Persatuan Bangsa-bangsa Asia Tenggara). Organisasi tersebut berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967. Peran Indonesia dalam memrakarsai berdirinya ASEAN tersebut membuktikan bahwa Indonesia mempunyai komitmen yang tinggi, selalu konsekuen, mampu pemimpin dan mampu bekerja sama dengan dengan negara-negara tetangga. (dimensi politik)

Meneladani nilai-nilai juang para tokoh yang berperan dalam pembentukan ASEAN sangat penting dilakukan. Nilai-nilai tersebut adalah kebersamaan, persatuan dalam perbedaan, musyawarah, toleransi, saling menghargai pendapat, rela mengorbankan tenaga, waktu, pemikiran dan saling berbagi pengalaman demi terwujudnya suatu organisasi yang dapat menjadi wahana untuk meningkatkan kerja sama Negara-negara di kawasan Asia Tenggara..

Kebersamaan selalu ditunjukkan oleh para tokoh yang hadir. ia selalu menghindarkan diri dari perilaku seperti ambisi untuk kepentingan pribadi maupun

negaranya sendiri mencari keuntungan pribadi, dan tidak ada janji-janji atau tuntutan dari para tokoh di kemudian hari, karena jika melakukan tindakan yang berlawanan dengan hal tersebut berarti melakukan tindakan korupsi ditinjau dari dimensi politik dan sosiologi.

Para tokoh ketika bersidang, selalu hadir tepat waktu, tidak korupsi waktu dan setiap tokoh dari berbagai negara diberi kesempatan untuk berbicara dan berpendapat, tidak ada deskriminasi dalam memberikan kesempatan. (dimensi sosiologi)

Para tokoh juga bersatu padu, walaupun mereka berasal dari berbagai negara, mereka tidak menunjukkan persaingan yang tidak sehat dan menghindari sikap boros dalam memanfaatkan fasilitas seperti kertas, waktu, dan dana. (dimensi ekonomi)

Di samping itu, perilaku yang perlu dicontoh dari para tokoh adalah membuat peraturan, mereka selalu bermusyawarah dalam memecahkan perbedaan pendapat, menjaga keaslian dokumen-dokumen hasil perumusan, ia secara ikhlas mengorbankan tenaga, waktu dan pemikiran, karena itu ia menghindarkan diri dari penipuan terhadap sesama tokoh dan selalu menjaga dokumen-dokumen hasil perumusan dari kerusakan, karena itu merupakan dokumen penting. (dimensi hukum)

Dampak positif dari organisasi yang telah dibentuk (ASEAN) di bidang ekonomi adalah sesama anggota ASEAN dapat bekerja sama untuk saling membeli atau menjual produk masing-masing ke negara sesama anggota. Jika kerjasama itu dilakukan dengan komitmen yang tinggi maka akan menambah kesejahteraan di masing-masing negara. Dilihat dari dimensi ekonomi kerjasama ini sangat menguntungkan.

Namun, segala bentuk kerja sama jika tidak dirawat dengan baik akan mengakibatkan persaingan yang tidak sehat. Persaingan yang tidak sehat juga akan berdampak menghalalkan segala cara, seperti melakukan suap (dimensi ekonomi), penyimpangan aturan, penggelapan pajak (dimensi hukum). semua tindakan itu sangat bertentangan dengan nilai kejujuran, tanggung jawab dan keadilan.

Sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bangsa Indonesia telah menunjukkan jati dirinya bahwa bangsa Indonesia cinta damai. Karena sebagai bangsa, Indonesia menyadari bahwa tidak mungkin hidup sendiri. Oleh karena itu perlu menjalin kerja sama dengan negara lain. Namun, dalam menjalin kerja sama tidak sebebas-bebasnya, ada prinsip-prinsip yang harus ditaati bersama. Prinsip-prinsip tersebut antara lain, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, menghormati kedaulatan negara lain, hidup berdampingan secara damai, dan bekerja sama yang saling menguntungkan.

Pada praktiknya ada saja negara-negara yang melanggar prinsip-prinsip kerja sama yang telah disepakati. Sebagai contoh ada negara besar yang seolah-olah memberikan bantuan kepada negara berkembang atau negara miskin. Tetapi dibalik itu negara tersebut ingin mencampuri lebih jauh kepentingan dalam negeri. Contoh lain misalnya kasus Ambalat, jelas kasus ini merupakan pelecehan terhadap bangsa Indonesia (dimensi politik dan hukum). Jika kedua hal ini benar-benar terjadi maka kita harus berani mengemukakan pendapat dan berani membela kedaulatan negara kita sampai titik darah penghabisan.

Peran Indonesia dalam lingkungan negara-negara ASEAN adalah Indonesia turut serta mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengembangkan kerja sama sosial budaya di kawasan Asia Tenggara melalui semangat kebersamaan dan kepedulian. Yang kedua, Indonesia ikut memperkuat perdamaian dan stabilitas kawasan dengan menjunjung tinggi rasa keadilan dan norma hukum masing-masing negara. (dimensi politik dan hukum)

## VI. Alokasi waktu

Pertemuan Pertama: 2 x 35 menit

Pertemuan Kedua: 2 x 35 menit

## VII. Metoda Pembelajaran

Strategi *Cooperative Learning technique Think Paire and share* dengan metode Pembelajaran:

1. Penugasan
2. Diskusi
3. Tanya jawab
4. Kerja kelompok (*Group Assignment/work*)

## VIII. Kegiatan Pembelajaran

### Pertemuan Pertama

Tahap Kegiatan	Aktivitas Siswa/Guru
A. Pendahuluan (10 Menit)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam</li> <li>2. Guru mengamati kebersihan dan ketertiban kelas serta melakukan pengecekan kehadiran siswa.</li> <li>3. Guru menyampaikan pokok bahasan dan tujuan pembelajaran hari ini.</li> <li>4. Guru mengajak siswa untuk .mengenal negara-negara ASEAN</li> </ol>

Tahap Kegiatan	Aktivitas Siswa/Guru
B. Inti (55 Menit)	<p><b>1. Eksplorasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Siswa dibagi dalam bentuk berpasang-pasangan kemudian diminta untuk mengamati gambar serta lembar informasi kemudian mengerjakan tugas yang disediakan oleh guru (terlampir).</li> <li>Setiap individu, lalu berpasangan, kemudian kelompok belajar diberi tugas untuk membahas berikut ini: <ol style="list-style-type: none"> <li>Sebutkan para tokoh pendiri ASEAN.</li> <li>Sebutkan negara-negara anggota ASEAN.</li> <li>Jelaskan latar belakang terbentuknya organisasi ASEAN.</li> <li>Jelaskan peran Indonesia melalui ASEAN</li> <li>Identifikasi tujuan pendirian ASEAN</li> <li>Sebutkan bentuk-bentuk kerja sama Indonesia dengan negara lain di Asia Tenggara.</li> <li>Jelaskan peran Indonesia dalam mengatasi perselisihan antar negara tetangga.</li> </ol> </li> </ol> <p><b>2. Elaborasi</b></p> <p>Setiap pasangan belajar selesai memecahkan dan pembahasan permasalahan diminta untuk mencari pasangan belajar yang lain, sehingga terbentuk kelompok kecil @ 4 orang dan ditugasi untuk saling berbagi pendapat/curah pendapat (sharing) dari hasil pemecahan masalah.</p> <p><b>3. Konfirmasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Setiap kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok dan kelompok lain menanggapi hasil presentasi tersebut.</li> <li>Guru mengklarifikasi dan meluruskan jika terjadi kesalahpahaman.</li> <li>Guru mengajukan pertanyaan “apakah ada yang belum dipahami siswa.</li> <li>Guru bersama siswa membuat rangkuman hasil belajar.</li> </ol>
C. Penutup (5 Menit)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Guru menyimpulkan kembali materi yang telah dipelajari.</li> <li>Siswa diberi tugas untuk mencari sumber informasi dari berbagai mediamasa tentang negara-negara di Asia Tenggara..</li> <li>Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan salam.</li> </ol>

## Pertemuan Kedua

Tahap Kegiatan	Aktivitas Siswa/Guru
A. Pendahuluan (10 Menit)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Guru membuka pelajaran dengan salam.</li> <li>Guru mengamati kebersihan dan ketertiban kelas serta melakukan pengecekan kehadiran siswa.</li> <li>Guru menyampaikan pokok bahasan dan tujuan pembelajaran hari ini.</li> <li>Guru menanyakan hasil pekerjaan yang ditugaskan minggu lalu.</li> </ol>
B. Inti (55 Menit)	<p><b>Elaborasi dan Konfirmasi</b></p> <p>Berdasarkan tugas minggu lalu, maka guru:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Meminta supaya tugas dikumpulkan.</li> <li>Membentuk kelompok @ 4 orang dan ditugasi untuk mendiskusikan hasil tugas minggu lalu</li> <li>Setiap kelompok secara musyawarah membuat kesimpulan tentang:</li> </ol>

Tahap Kegiatan	Aktivitas Siswa/Guru
	a). peran Indonesia melalui ASEAN b). tujuan pendirian ASEAN c). bentuk-bentuk kerja sama Indonesia dengan negara lain di Asia Tenggara. d). peran Indonesia dalam mengatasi perselisihan antar negara tetangga. 4. Setiap kelompok maju ke depan kelas untuk menjelaskan hasil kerja kelompok. 5. Kelompok lain diperbolehkan memberikan komentar, pertanyaan maupun saran kepada kelompok yang tampil 6. Guru memberikan penjelasan dan pelurusan. 7. Guru bersama siswa membuat kesimpulan hasil belajar.
C. Penutup (5 Menit)	1. Guru menyimpulkan kembali materi yang telah dipelajari. 2. Guru mengingatkan agar siswa belajar dengan baik untuk menghadapi ulangan pada pertemuan selanjutnya. 3. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan salam

## IX. Penilaian (secara lengkap dalam lampiran)

### A. Penilaian Proses

1. Nontes
2. Tes sikap

### B. Penilaian Hasil

1. Pemberian tugas
2. Tes tertulis bentuk uraian

## X. Sumber Belajar:

1. Najib Sulhan, 2008, *Mari Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SD/MI Kelas VI*, Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional.
2. Sunarso, Anis Kusumawardani, 2008, *Pendidikan Kewarganegaraan SD/MI Kelas VI*, Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional.
3. Lembar Informasi
4. Gambar yang berkaitan dengan materi

....., .....2011

Mengetahui

Guru PKn Kelas VI

Kepala Sekolah

## LAMPIRAN INSTRUMEN PENILAIAN

### A. Penilaian Proses

#### Penilaian Sikap

Berilah tanda contreng ( ✓ ) pada indikator sikap berikut ini!

No	Pernyataan	Indikator sikap			
		1	2	3	4
1.	Meneladani semangat juang para tokoh pendiri ASEAN merupakan sikap yang baik, karena mengandung nilai-nilai yang berguna dalam kehidupan sehari-hari				
2.	Musyawarah selalu dikedepankan dalam pembentukan organisasi ASEAN, karena musyawarah merupakan cara terbaik dalam mengambil keputusan.				
3.	Sebagai warga negara kolektivitas, prinsip persatuan diutamakan dalam keberagaman yang perlu diteladani oleh setiap warga negara				
4.	Ambisi pribadi bertentangan dengan nilai kebersamaan, karena perilaku tersebut hanya kepentingan pribadi saja.				
5.	Tidak menepati waktu, termasuk bentuk tindakan korupsi waktu, karena berakibat merugikan pihak lain.				
6.	Rela berkorban baik tenaga, waktu, maupun pemikiran, dalam setiap kegiatan seyogyanya menjadi motivasi bagi para pemimpin negara dewasa ini.				

#### ***Pedoman Penskoran***

Mencontreng angka 1 = sangat tidak setuju

Mencontreng angka 2 = kurang setuju

Mencontreng angka 3 = setuju

Mencontreng angka 4 = sangat setuju

Skor maksimum seluruh soal sikap = 4 X 6 item = 24

Skor minimum seluruh soal sikap = 1 X 6 = 6.

$$\text{Nilai sikap} = \frac{\text{Jumlah perolehan skor}}{\text{Jumlah skor maksimum}} \times \text{nilai ideal}$$

Kriteria Sikap:

86 – 100 = sangat baik.

76 – 85 = baik

66 – 70 = cukup.

≤ 65 = kurang

## B. Penilaian Hasil

### Tes Tertulis

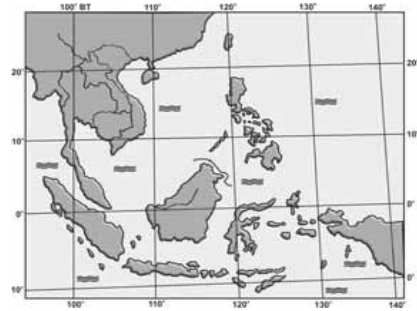
#### 1. Pilihlah satu jawaban yang benar!

a. Kepala negara Malaysia adalah seorang ...

- a. presiden      c. perdana menteri
- b. datuk          d. raja

b. Huruf B pada gambar peta di samping menunjukkan letak negara ...

- a. Vietnam
- b. Kamboja
- c. Malaysia
- b. Thailand



c. Jumlah anggota ASEAN sekarang ini ....

- a. 7 negara      c. 9 negara
- b. 8 negara      d. 10 negara

d. Ibu kota negara Filipina adalah ....

- a. Bangkok              c. Manila
- b. Kuala Lumpur      d. Rangoon

e. Mata uang Thailand disebut ....

- a. bath                  c. peso
- b. ringgit              d. dolar

f. Jakarta Informal Meeting digunakan untuk menyelesaikan masalah ....

- a. Kamboja              c. Thailand
- b. Filipina                d. Malaysia

g. Menteri Luar Negeri Indonesia yang menandatangani naskah Deklarasi Bangkok adalah ....

- a. Adam Malik                      c. Ali Murtopo
- b. Mochtar Kusumaatmaja      d. Ali Alatas

h. Sekretariat Tetap ASEAN berada di ....

- a. Jakarta                      c. Manila
- b. Kuala Lumpur              d. Bangkok

i. Burma adalah nama lain negara ....

- a. Thailand                      c. Filipina
- b. Myanmar                    d. Kamboja

j. New Kip adalah mata uang negara ....

- a. Laos                          c. Kamboja
- b. Vietnam                    d. Thailand



## 2. Isilah dengan jawaban yang benar!

- ASEAN didirikan pada tanggal ....
- Menteri luar negeri Indonesia yang ikut menandatangani Deklarasi Bangkok adalah ....
- Brunei Darussalam bergabung dan diterima sebagai anggota ASEAN pada tanggal ....
- Tukar-menukar misi kebudayaan termasuk kerja sama dalam bidang ....
- Proyek abu soda didirikan di negara ....

## 3. Jawablah dengan benar!

- Siapa yang mendirikan negara Singapura?
- Meliputi bidang apa saja kerja sama ASEAN?
- Sebutkan lima menteri luar negeri yang menandatangani Deklarasi Bangkok!
- Sebutkan peran Indonesia di lingkungan ASEAN!
- Sebutkan tiga negara yang terletak di kawasan Indocina!
- Jelaskan latar belakang terbentuknya ASEAN!
- Jelaskan bentuk-bentuk kerjasama antar negara anggota ASEAN!
- Bagaimana menurut pendapatmu jika ada pemimpin yang mengingkari hasil keputusan?

### ***Pedoman Penskoran:***

#### **A. Pilihan ganda:**

Jawaban benar nilai 1 dan jawaban salah nilai 0

#### **B. Isian**

Jawaban tepat nilai 1, jawaban salah nilai 0

#### **C. Uraian**

- Bila jawaban sangat sempurna diberi skor 4
- Bila jawaban sempurna diberi skor 3
- Bila jawaban kurang sempurna diberi skor 2
- Bila jawaban tidak sempurna diberi skor 1

Skor maksimum seluruh soal sikap = 4 X 5 item = 20

Skor minimum seluruh soal sikap 1 X 5 = 5

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah perolehan skor}}{\text{Jumlah skor maksimum}} \times \text{nilai ideal}$$

Nilai ideal = 100

## LEMBAR INFORMASI DAN GAMBAR



*Peta wilayah negara anggota ASEAN*



*Suasana penandatanganan Deklarasi Bangkok, 8 Agustus 1967*



***Lambang ASEAN***



***Indonesia pernah menjadi tuan rumah pertemuan kepala negara dan kepala pemerintahan (KTT) ASEAN di Bali, tahun 2003***

### ***Rangkuman untuk Diingat***

*ASEAN didirikan berdasarkan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Negara-negara pendiri ASEAN, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina.*

*Anggota ASEAN saat ini berjumlah sepuluh negara, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Kamboja, Laos, dan Myanmar.*

*Gedung Sekretariat Tetap ASEAN berada di Jakarta.*

*Kerja sama ASEAN saat ini meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Indonesia mempunyai peranan penting di kawasan Asia Tenggara. Peran Indonesia, antara lain sebagai pemrakarsa berdirinya ASEAN, ikut membantu penyelesaian masalah Kamboja, dan sebagainya.*

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Model pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan wahana untuk membantu guru SD/MI dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah, baik di dalam maupun di luar kelas. Kedudukan guru sebagai motivator dan fasilitator menuntut adanya kompetensi guru dalam merencanakan pembelajaran secara optimal dengan mengacu pada standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Untuk menghasilkan kegiatan pembelajaran yang baik dan benar diperlukan perencanaan pembelajaran yang baik dan benar pula dengan mengacu pada peraturan yang telah ditentukan dan menggunakan strategi, pendekatan dan model-model pembelajaran inovatif dan relevan. Strategi dasar pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berupa variasi interaksi pembelajaran di dalam kelas sebagai peletakan dasar kompetensi dan elemen esensial terkait dengan berbagai dimensi tujuan. Dengan adanya model pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta penilaian proses dan hasil pembelajaran di dalam dan di luar kelas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Allan Jhonson, 2008, (*Wikipedia, ensiklopedia bebas-Sosiologi 23/02/2008*),
- Fajar, Arnie, 2003, Pengembangan Sikap Nasionalisme Melalui Pendekatan Sain Teknologi Masyarakat pada SMA Negeri 8 di Kota Bandung- Jawa Barat (Tesis)
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami untuk Membasmi: Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Laila, Najmu, 2009, *Pemikir Penggerak*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Lickona, Thomas, 1991, *Educating for Character How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*, New York: Bantam Books.
- Najib Sulhan, 2008, *Mari Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SD/MI Kelas VI*, Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang *Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang *Pertahanan Negara*.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang *Keterbukaan Informasi publik*.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*
- Republik Indonesia, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5/2004 tentang *Percepatan Pemberantasan Korupsi*
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang *Standar Penilaian Pendidikan*.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang *Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah* (Lampiran)

- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang *Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 Tahun 2006 Tentang *Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah*
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 06 Tahun 2007 tentang *Perubahan Permendiknas No. 24 Tahun 2006*.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang *Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*.
- Schumpeter, A. Joseph., 1947, *Capitalism, Socialism, and Democracy*. edisi ke-2, New York : Harper.
- Seno Adji, Indrianto, 2009, *Korupsi Sistemik*, Jakarta: Kompas.
- Soerjono Soekanto, 2008, ([www.dikmenum.go.id](http://www.dikmenum.go.id) I. 08/07/2008)
- Stiglitz, Josep E., 2002, *Conflicts of interest in eradicating corruption*. The Jakarta Post, 6. 11 November.
- Sunarso, Anis Kusumawardani, 2008, *Pendidikan Kewarganegaraan SD/MI Kelas VI*, Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional.
- Teten Masduki, 2006. *Korupsi jalan terus, kenapa tanya?*. Jakarta: Kompas. Hal. 6, 26 Januari.
- Transparancy International (Wikipedia, ensiklopedia bebas, 2007)
- Von Aleman, Ulrich, 2004. *The unknown depths of political theory: the case for a multideimensional concept of corruption*. Crime, Law & Social Change (42). 25-34.
- Williams, Robert, 1999, *New concepts for old?*. Third World Quarterly, Vol. 20. No. 3. Hal. 503-513.